

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial. Dari interaksi tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pun bisa menjadi latar belakang timbulnya konflik. Seperti yang terjadi pada peristiwa pemblokiran Pelabuhan Sape di Bima, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi atas penolakan warga atas ijin tambang yang diberikan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara melalui SK 188.

Terjadinya konflik memang identik dengan adanya pertentangan. Dalam menganalisis tentang konflik, sebagai peneliti kita perlu mengetahui latar belakang atau sumber dari konflik tersebut. Media sebagai salah satu yang menjadi sumber informasi publik haruslah bisa memberikan informasi yang berimbang. Informasi yang diberikan oleh media kepada masyarakat tidak boleh memperburuk kondisi konflik atau malah menimbulkan konflik baru.

Berbicara mengenai pemberitaan konflik antar aparat keamanan dengan massa FRAT dalam peristiwa pembubaran paksa pemblokiran pelabuhan di Sape Bima, tidak bisa dilepaskan dari SKH Lombok Post. Lombok Post adalah satu-satunya surat kabar lokal di Nusa Tenggara Barat. Peneliti memilih Lombok Post sebagai media yang diteliti, karena selain tidak ada media cetak dengan konten lokal lain di wilayah Nusa Tenggara Barat, Lombok Post juga memberikan porsi berita yang cukup dalam pemberitaan mengenai peristiwa di Sape ini. Selain itu,

kedekatan psikologis antara SKH Lombok Post dengan masyarakat di wilayah Sape Bima yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. SKH Lombok Post pun memberi ruang bagi masing-masing wilayah di Nusa Tenggara Barat untuk mendapat porsi pemberitaan yang sama. Hal ini terlihat dari pemberian halaman dari masing-masing wilayah kabupaten di NTB.

Setelah melakukan analisis level teks dengan menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki pada empat artikel berita serta melakukan analisis level konteks, peneliti mendapatkan bahwa media *frame* Lombok Post terhadap konflik Sape adalah peristiwa konflik di Sape dibingkai sebagai peristiwa tindakan anarkis massa yang merugikan. Walaupun Lombok Post menyatakan tidak melakukan keberpihakan dan juga mencoba untuk berimbang serta menggunakan pendekatan jurnalisme damai dalam pemberitaannya, namun pada prakteknya peneliti masih merasa Lombok Post melakukan keberpihakan. Pemilihan dan penempatan narasumber yang dilakukan oleh Lombok Post lebih banyak menampilkan pihak aparat keamanan dan sedikit sekali pihak dari massa FRAT yang memberikan pernyataan.

B. Saran

Penelitian tentang pemberitaan konflik di Pelabuhan Sape, Bima menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki pada level teks dan dibantu dengan analisis dengan pendekatan konstruksi realitas sosial pada level konteks masih perlu disempurnakan dan sangat terbuka kemungkinan jika materi ini dianalisis dengan menggunakan analisis framing model lain.

Kendala yang dihadapi peneliti ketika melakukan analisis teks yaitu untuk membedah makna yang terkandung dari tiap-tiap kata atau kalimat yang diteliti, penggunaan judul, penempatan narasumber, penggunaan grafis dan juga foto. Tidak dipungkiri ada ketidaktepatan peneliti dalam menggali *frame* pada setiap berita yang dianalisis.

Peneliti melihat *frame* hanya dari satu media saja yaitu Lombok Post. Banyak hal yang bisa digali lebih dalam mengenai pemberitaan peristiwa konflik di Sape, Bima ini misalnya dengan membandingkannya dengan koran lokal lain yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Penelitian tentang konflik bisa dilakukan dengan metode lainnya seperti analisis isi dan analisis wacana.

Saran yang peneliti sampaikan untuk pihak Lombok Post adalah, perlunya pelatihan dan pengenalan medan liputan untuk masing-masing wartawannya. Pelatihan dan juga konsep jurnalistik perlu diberikan kepada wartawan sehingga wartawan mengerti tentang kaidah-kaidah jurnalistik. Akan berbeda hasilnya jika wartawan pernah mendapatkan pengetahuan tentang kaidah jurnalistik dan kode etik dibandingkan dengan yang belum pernah mendapatkan pengetahuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LkiS: Yogyakarta.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media Group : Jakarta
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shoemaker, Pamela J, Stephen D. Reese. 1996. *Mediating the Message*. New York: Longman.
- Siregar, Ashadi, dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalisme Damai. Meretas Jurnalisme Damai di Area Konflik*. Yogyakarta: P_IDEA.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS.
- Yayasan KIPPAS. 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumber Jurnal :

- Scheufele, Dietram A. 1999. *Framing as Theory of Media Effect*. Journal of Communication.

Sumber Skripsi dan Penelitian :

- Soi, Maria Olivia Suhartati (060903077). 2010. *Pers dalam Pemberitaan Konflik Antarwarga Suku Sasak (Analisis Framing tentang Pemberitaan Konflik Antarwarga Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah dalam SKH Lombok*

Post periode 26 – 30 September 2009 dan periode 2 Februari – 30 Maret 2010). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dugis, Noveina Silviyani (040902187). 2008. *Pers dan Konflik Perang Suku di Timika*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nayoan, Yoan AD. 2009. *Profiling Pelibat Wacana Kelangkaan BBM di Banjarmasin dan sekitarnya. (Analisis Framing Pencitraan Pelibat Wacana Kelangkaan BBM di Banjarmasin dan Sekitarnya terkait Perannya sebagai Penyebab Kelangkaan BBM dalam Pemberitaan SKH Banjarmasin Post periode 15 Juni – 31 Juli 2008)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil Pencarian Fakta Tindak Kekerasan Aparat Kepolisian di Lambu Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat oleh Tim Advokasi Korban Lambu Bima. 2012.

Sumber Online :

Gustaman, Yogi. <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/24/21270332/Presiden.Diminta.Evaluasi.Bentrok.Berdarah.di.Sape>. *Presiden Diminta Evaluasi Bentrok Berdarah di Sape*. diakses tanggal 14 Mei 2012 pukul 15.30

<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/11/290631/284/1/Jumlah-Kasus-Konflik-Agraria-Meroket-di-2011>. *Jumlah Kasus Konflik Agraria Meroket di 2011*. diakses tanggal 14 Mei 2011 pukul 15.50



LAMPIRAN

Coding sheet Tema 1

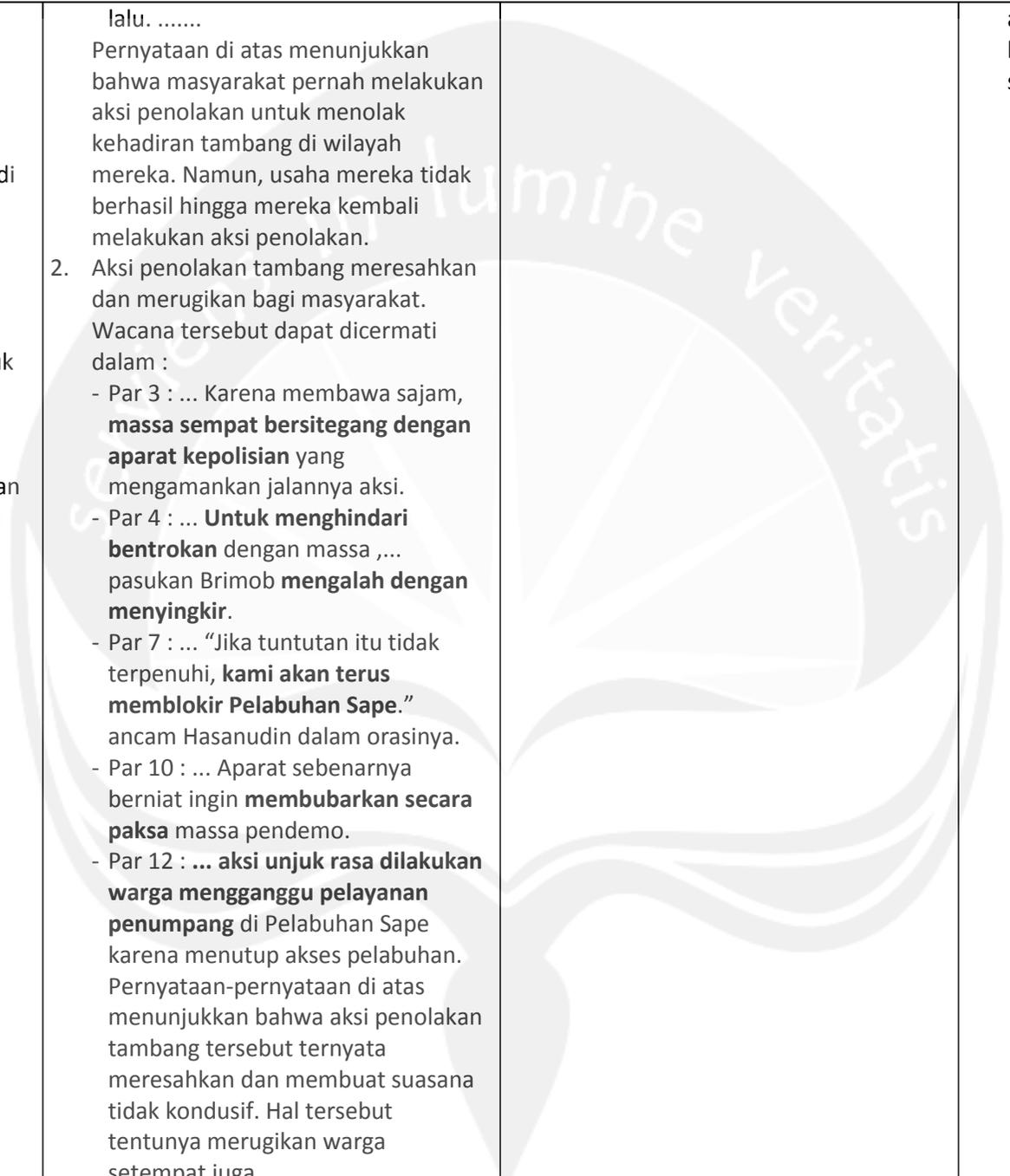
Judul Berita : Tolak Tambang, Pelabuhan Sape diblokir

Tanggal terbit : 20 Desember 2011

Rubrik : Bima-Dompu

Penulis : Indra Gunawan

Struktur Skriptual	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>Objek wacana Pemblokiran Pelabuhan Sape yang dilakukan oleh warga Lambu karena menolak kehadiran tambang di wilayah mereka.</p> <p>Pelibat wacana / subjek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Lambu Menolak kehadiran tambang di wilayah mereka. Dalam edisi ini direpresentasikan oleh Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang melakukan pemblokiran jalan dan pelabuhan Sape. 2. Aparat Polisi dan Brimob Aparat polisi dan brimob merupakan pihak yang mengamankan jalannya aksi pemblokiran hingga pihak yang berniat untuk membubarkan aksi pemblokiran secara paksa karena dianggap merugikan masyarakat. <p>Pelantun wacana / narasumber</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasanudin Koordinator lapangan aksi pemblokiran jalan dan Pelabuhan Sape. Sebagai pemimpin aksi, masyarakat akan mendukung apa yang dikatakan oleh Hasanudin terkait dengan aksi penolakan tambang. 	<p>Jenis wacana Jenis wacana yang muncul dalam teks berita tersebut bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. warga Lambu kembali menolak kehadiran tambang hingga melakukan aksi pemblokiran jalan dan pelabuhan Sape. Wacana tersebut dapat dicermati dalam : <ul style="list-style-type: none"> - Judul : Tolak Tambang, Pelabuhan Sape Diblokir - Lead : Aksi penolakan tambang kembali dilakukan warga Kecamatan Lambu. dengan memblokir jalan di Desa Sumi, Kecamatan Lambu. Pernyataan di atas menunjukkan adanya peristiwa penolakan tambang yang dilakukan warga. Namun ini, bukan yang pertama kalinya warga melakukan aksi penolakan terhadap tambang tersebut. - Par 7 : Tuntutan utama dari massa FRAT, meminta Bupati Bima untuk mencabut SK 188, yang memberikan izin perusahaan tambang beroperasi di wilayah Kecamatan Lambu.membebaskan Koordinator Lapangan (Korlap) aksi sebelumnya Adi Supriadi yang ditahan Polres Bima Kota beberapa waktu yang 	<p>Placement dalam struktur pemberitaan Wacana peristiwa aksi warga dalam menolak kehadiran tambang dan berujung pada pemblokiran Pelabuhan Sape, mendominasi artikel ini. Paragraf 1 sampai dengan paragraf 9 berisi tentang peristiwa pemblokiran Pelabuhan Sape dan juga tuntutan warga atas keberadaan tambang. Mulai dari paragraf 10 hingga paragraf terakhir berisi tentang proses penanganan aksi pemblokiran. Hal ini membuat pembaca tidak terlalu memperhatikan dan terkesan kurang penting.</p> <p>Placement dalam distribusi halaman Artikel ini ditempatkan pada rubrik Bima-Dompu pada halaman 16. Para pembaca yang berada di wilayah Bima dan Dompu bisa merasakan unsur kedekatan terhadap peristiwa ini. Namun, dari sisi <i>urgensi</i>, Lombok Post belum memandang peristiwa ini sebagai peristiwa penting karena belum meletakkannya pada posisi <i>Headline</i>.</p>	<p>Keywords</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 3 : ... karena bersitegang dengan aparat keamanan yang mengamankan jalannya aksi. Kata bersitegang yang digunakan wartawan untuk menggambarkan suasana aksi pemblokiran Pelabuhan Sape merupakan sebuah penegasan bahwa aksi tersebut dalam kondisi yang tidak kondusif dan bisa berujung brutal. - Par 10 : ... ingin membubarkan secara paksa massa pendemo. Dengan menggunakan kata membubarkan secara paksa, terdapat kesan bahwa aksi tersebut sudah berlangsung tidak kondusif dan tidak terdapat kesepakatan sebagai hasil negosiasi dari pihak kemandan dengan warga yang melakukan aksi tersebut. <p>Depiction</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 12 : ... “Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi seperti ini, kita serahkan sepenuhnya pada aparat polisi.” Katanya pasrah. Kalimat di atas memberi sedikit gambaran mengenai situasi dan kondisi peristiwa pemblokiran pelabuhan yang tidak mampu lagi diatasi oleh masyarakat sipil yang

<p>2. Slamet Riyadi Manajer Operasional ASDP Sape mewakili masyarakat yang menganggap aksi pemblokiran Pelabuhan Sape sebagai bentuk protes atas keberadaan tambang di wilayah Lambu sebagai aksi yang merugikan.</p> <p>3. AKBP Kumbul KS SIK Sebagai Kapolres Kota Bima yang memimpin aparat keamanan untuk mengamankan jalannya aksi pemblokiran. Sebagai Kapolres, ia berperan dalam pengambilan keputusan apakah aksi pemblokiran Pelabuhan Sape harus dibubarkan atukah bisa diselesaikan dengan negosiasi.</p>	<p>lalu.</p> <p>Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat pernah melakukan aksi penolakan untuk menolak kehadiran tambang di wilayah mereka. Namun, usaha mereka tidak berhasil hingga mereka kembali melakukan aksi penolakan.</p> <p>2. Aksi penolakan tambang meresahkan dan merugikan bagi masyarakat. Wacana tersebut dapat dicermati dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 3 : ... Karena membawa sajam, massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi. - Par 4 : ... Untuk menghindari bentrokan dengan massa ,... pasukan Brimob mengalah dengan menyingkir. - Par 7 : ... “Jika tuntutan itu tidak terpenuhi, kami akan terus memblokir Pelabuhan Sape.” ancam Hasanudin dalam orasinya. - Par 10 : ... Aparat sebenarnya berniat ingin membubarkan secara paksa massa pendemo. - Par 12 : ... aksi unjuk rasa dilakukan warga mengganggu pelayanan penumpang di Pelabuhan Sape karena menutup akses pelabuhan. Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa aksi penolakan tambang tersebut ternyata meresahkan dan membuat suasana tidak kondusif. Hal tersebut tentunya merugikan warga setempat juga. 		<p>akhirnya meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan situasi.</p>
---	---	--	--

<p style="text-align: center;">Frame Seleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga kembali menolak kehadiran tambang di wilayah Kecamatan Lambu. 2. Aksi penolakan tambang berujung pada aksi pemblokiran Pelabuhan Sape oleh massa FRAT. 3. Aksi tersebut dianggap meresahkan dan merugikan warga. 	<p style="text-align: center;">Frame Saliansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksi pemblokiran Pelabuhan Sape adalah aksi warga yang merugikan dan meresahkan masyarakat 2. Menggunakan dua perangkat retorika yaitu <i>keyword</i> dan <i>depiction</i>. Keywords yang muncul dalam teks adalah bersitegang dan membubarkan secara paksa. Dua hal tersebut merujuk pada keadaan tidak kondusif yang terjadi selama aksi pemblokiran
<p style="text-align: center;">Media Frame</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lombok Post memandang peristiwa pemblokiran Pelabuhan Sape sebagai bentuk tindakan merugikan yang dilakukan oleh warga. 2. Belum menganggap peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang penting. 3. Pada artikel ini, Lombok Post masih terfokus pada peristiwa pemblokiran Pelabuhan Sape, bukan pada dampak dan upaya penanganan lebih lanjut. 	

Coding sheet Tema 2

Judul Berita : Dua Tewas, Belasan Luka-luka

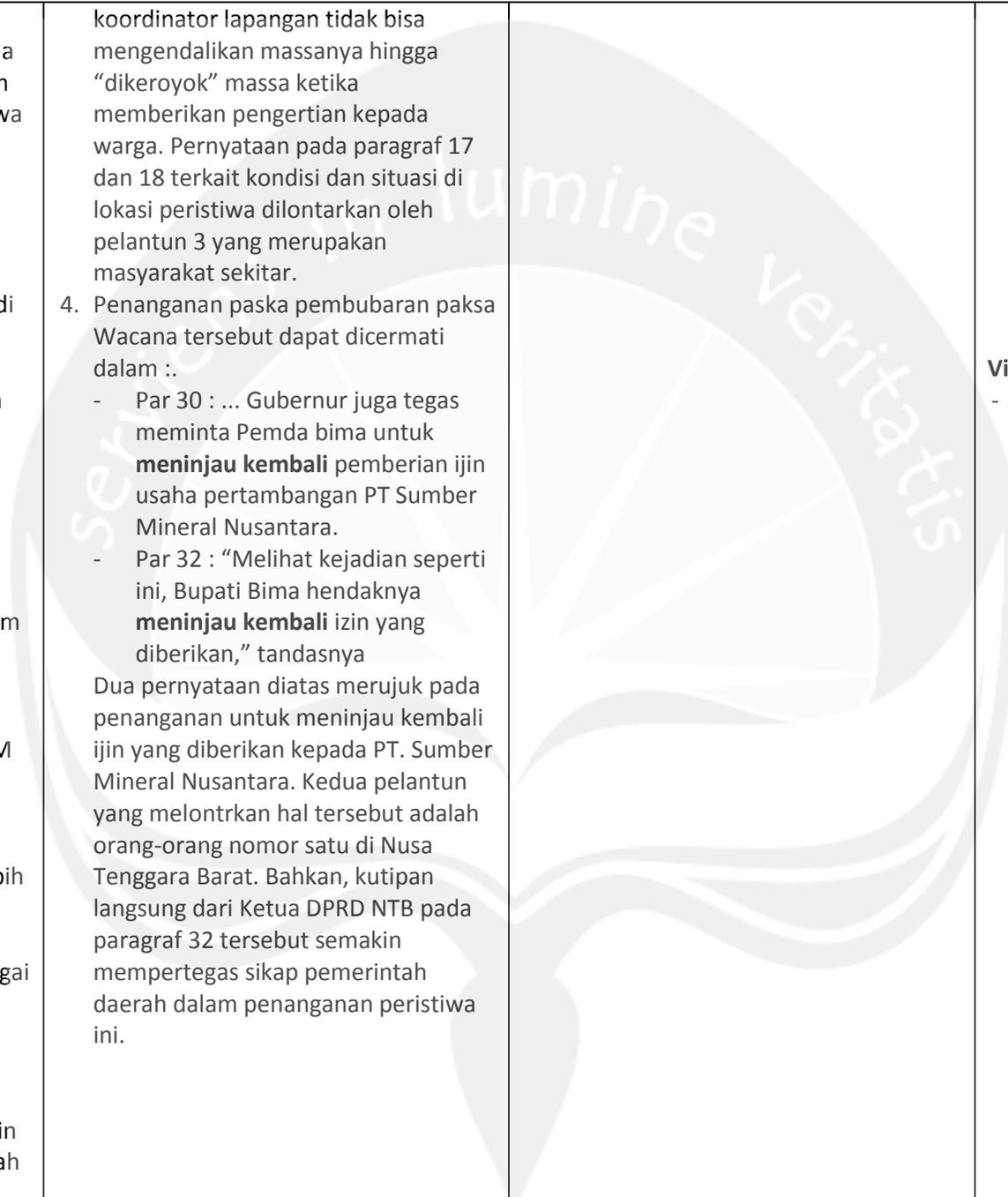
Tanggal terbit : 26 Desember 2011

Rubrik : Headline

Penulis : Indra Gunawan

Struktur Skriptual	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>Objek wacana Pembubaran aksi massa di Pelabuhan Sape berakhir ricuh hingga timbul korban (judul dan <i>lead</i>)</p> <p>Pelibat wacana / subjek</p> <p>1. FRAT Massa yang menolak kehadiran tambang di wilayah Kecamatan Lambu, yang kemudian memblokir Pelabuhan Sape akibat tuntutan mereka tidak terpenuhi. Warga dan FRAT sudah memblokir pelabuhan selama lima hari dan negosiasi tidak membuahkan hasil. Massa sudah tidak bisa diberi pengertian bahkan oleh koordinator lapangan mereka sendiri. Tiga kali negosiasi tidak berhasil hingga akhirnya aparat keamanan mengambil tindakan untuk membubarkan aksi mereka yang dianggap telah merugikan masyarakat.</p> <p>2. Pemda Bima Pemda Bima sebagai pihak yang mengeluarkan SK 188 terkait ijin pertambangan di wilayah Kecamatan Lambu. Dengan adanya peristiwa ini, Pemda Bima diminta untuk meninjau kembali ijin yang diberikan.</p>	<p>Jenis wacana Jenis wacana yang muncul dalam artikel ini adalah :</p> <p>1. Penanganan peristiwa pemblokiran Pelabuhan Sape tidak bisa dilakukan dengan negosiasi hingga akhirnya dilakukan pembubaran secara paksa. Wacana tersebut dapat dicermati dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lead : Aparat kepolisian akhirnya membubarkan paksa aksi massa yang memblokir pelabuhan Sape. - Par 2 : Pembubaran paksa aksi... menyusul negosiasi menemui jalan buntu. - Par 5 : ... penanganan massa sudah melalui tahapan atau pola. Yakni pelayanan, pengendalian, penanggulangan, dan langkah akhir adalah penindakan. <p>Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat kata sepakat antara massa dengan aparat kepolisian dalam menangani peristiwa tersebut hingga akhirnya ditempuh pembubaran paksa oleh pihak keamanan. Pada paragraf lima, pernyataan tersebut dilontarkan oleh pelantun 2 yaitu Kapolda NTB.</p> <p>2. Pembubaran secara paksa tersebut menimbulkan korban luka-luka dan meninggal dunia. Namun, belum</p>	<p>Placement dalam struktur pemberitaan Wacana pembubaran aksi massa di Pelabuhan Sape berakhir ricuh hingga timbul korban memang terlihat begitu kuat dalam artikel ini. Mulai dari judul hingga paragraf ke 28. Pada paragraf ke 29 hingga paragraf 33, diberi sub judul baru yaitu “Pemprov Tanggung Biaya Pengobatan Korban”. Paragraf ke 34 hingga paragraf 38 juga mendapat sub judul baru yaitu “ Korban Penembakan Dirujuk ke RSUP”. Tujuan pemberian sub judul ini bisa memberikan fokus baru pada pembaca. Karena tulisan artikel ini yang tergolong panjang, sehingga ketika sudah memasuki bagian akhir dari tulisan pertama, pembaca sudah kehilangan fokusnya. Sub judul pertama memberikan fokus pada penanganan korban yang dilakukan oleh Pemprov NTB terkait dengan pembiayaan korban. Sub judul kedua memberikan fokus tentang rujukan kepada korban untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik di RSUP NTB. Setelah satu minggu, peristiwa ini dimunculkan dalam rubrik Bima-Dompu, ini adalah artikel pertama yang menjadi headline. Dengan judul yang terkesan bombastis karena sudah memasukkan unsur korban.</p> <p>Placement dalam distribusi halaman</p>	<p>Methapors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 2 : ... menyusul negosiasi menemui jalan buntu. Menekankan bahwa tidak terdapat kata sepakat antara pihak aparat keamanan dan juga massa FRAT. Sehingga tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain melakukan penghentian pemblokiran secara paksa. - Par 2 : ... tetap menduduki pelabuhan Sape hingga lima hari yang lalu. Kata menduduki mengesankan adanya sebuah kekuasaan yang dipegang sehingga pihak lain tidak bisa berbuat sesuatu terkait dengan hal yang diduduki / dikuasai. Dalam hal ini adalah Pelabuhan Sape. - Par 14 : Negosiasi pertama berjalan alot. Kata berjalan alot ini menekankan bahwa proses negosiasi yang coba dilakukan tidak berjalan dengan lancar. Bahkan tiga kali proses negosiasi tidak cukup untuk mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu aparat keamanan dan juga massa FRAT. - Par 17 : ... “dikeroyok” oleh massanya sendiri. Pada paragraf ini, dijabarkan

<p>3. PT. Sumber Mineral Nusantara PT. Sumber Mineral Nusantara sebagai pihak yang diberi ijin oleh pemerintah daerah kabupaten Bima untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pertambangan di wilayah Kecamatan Lambu. Dalam hal ini sebagai pihak yang dituntut oleh masyarakat untuk menghentikan kegiatan pertambangannya.</p> <p>Pelantun wacana / narasumber</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ali Usman Akhim Ketua Walhi NTB yang memberikan informasi tentang jumlah korban. Jumlah dan kondisi korban yang diberikan oleh pihak Walhi dibandingkan dengan jumlah dan kondisi korban yang diberikan oleh pihak kepolisian karena dua sumber tersebut memberikan informasi yang berbeda. 2. Pihak Polda NTB (Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunadi, Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein) Pihak kepolisian daerah NTB lebih banyak diwakilkan oleh Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein dalam memberikan tanggapan terkait peristiwa yang terjadi. Kepentingan pernyataan dari pihak kepolisian daerah NTB adalah mengenai kondisi dan situasi yang terjadi. Serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menghentikan aksi massa tersebut. Selain itu, pihak 	<p>diketahui secara pasti penyebab kematian korban. Wacana tersebut dapat dicermati dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Judul : Dua Tewas, Belasan Luka-luka - Par 2 : ... dua warga tewas atas bana Arief Rahman 18 tahun dan Syaiful 17 tahun. - Par 3 : ... lima orang tewas dan puluhan luka-luka. - Par 6 : ... “saya tidak tahu pasti penyebab kematiannya.” <p>Pernyataan-pernyataan di atas merujuk pada timbulnya korban jiwa akibat dari aksi tersebut.</p> <p>3. Kondisi lingkungan dan masyarakat yang tidak kondusif Wacana tersebut dapat dicermati dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 9 : ... massa melakukan tindakan anarkis sepanjang jalan. - Par 14 : Negosiasi pertama berjalan alot. - Par 17 : Malah saat Hasanudin mencoba memberi pengertian pada warga, untuk menyelesaikan pemblokiran pelabuhan secara baik-baik, malah sempat “dikeroyok” oleh massanya sendiri. - Par 18 : Suasana mencekam berlangsung hingga 30 menit. <p>Dari pernyataan-pernyataan di atas, terlihat bahwa kondisi di sana tidak kondusif dan berlangsung dalam keadaan dibawah tekanan. Bahkan, pemimpin warga Hasanudin selaku</p>	<p>Artikel ini ditempatkan pada bagian Headline. Pada bagian ini Lombok Post memandang peristiwa pembubaran paksa ini penting, karena sudah sampai menimbulkan korban. Dilihat dari jumlah artikel yang dipasang pada halaman muka, sejumlah lima artikel, membuat tema ini tergolong penting.</p>	<p>tentang kondisi yang tidak kondusif. Bahkan pemimpin massa FRAT, Hasanudin sebagai koordinator lapangan tidak bisa mengendalikan massanya dalam proses negosiasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 18 : ...”Suasana mencekam berlangsung hingga 30 menit.” Penggunaan kata mencekam, menggambarkan sebuah kondisi yang tidak stabil serta tidak adanya kepastian. Selain itu, kondisi mencekam lekat hubungannya dengan ketakutan, dimana kondisi saat itu masyarakat dan juga pengguna pelabuhan Sape benar-benar diliputi ketakutan karena terjadi pembubaran paksa yang berakibat korban jiwa. - Par 23 : ... Dan aktivitas NTB-NTT lumpuh total.” Memberi gambaran bahwa kondisi NTB dan NTT seperti orang lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa karena akses di antara keduanya terputus. - Par 29 : ... insiden berdarah yang terjadi di Sape, Bima disesalkan Pemprov NTB. Insiden berdarah menekankan bahwa terjadi sebuah peristiwa yang hebat hingga timbul korban baik korban luka-luka maupun korban jiwa. Penggunaan kata berdarah sendiri memberi kesan dramatis. <p>Keywords</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 30 : ... untuk meninjau kembali pemberian izin usaha. - Par 33 : “melihat kejadian seperti
--	--	--	---

<p>kepolisian NTB adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap segala hal terkait pengambilan keputusan dalam proses penanganan peristiwa pemblokiran Pelabuhan Sape.</p> <p>3. Haris Haris adalah warga yang memberikan keterangan tentang peristiwa pemblokiran dan pembubaran paksa yang terjadi di Pelabuhan Sape. Keterangan dari Haris, akan melengkapi sumber informasi yang dibutuhkan karena Haris adalah representasi dari masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi kejadian.</p> <p>4. TGH M Zainul Majdi Sebagai orang nomor satu di provinsi NTB, pendapat dan tindakan TGH M Zainul Majdi dalam menyikapi persoalan pemblokiran dan pembubaran paksa ini akan mendapatkan sorotan utama. Sebagai seorang pemimpin, TGH M Zainul Majni tentunya harus bisa memberikan keputusan dan juga masukan yang berguna untuk membuat kondisi NTB menjadi lebih baik.</p> <p>5. Lalu Moh Faozal Juru Bicara Pemprov berlaku sebagai pihak penyambung antara pemerintah provinsi dan masyarakat. Hal yang disampaikannya dapat diartikan sebagai representasi apa yang ingin disampaikan oleh pihak pemerintah provinsi.</p>	<p>koordinator lapangan tidak bisa mengendalikan massanya hingga “dikeroyok” massa ketika memberikan pengertian kepada warga. Pernyataan pada paragraf 17 dan 18 terkait kondisi dan situasi di lokasi peristiwa dilontarkan oleh pelantun 3 yang merupakan masyarakat sekitar.</p> <p>4. Penanganan paska pembubaran paksa Wacana tersebut dapat dicermati dalam .:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 30 : ... Gubernur juga tegas meminta Pemda bima untuk meninjau kembali pemberian ijin usaha pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara. - Par 32 : “Melihat kejadian seperti ini, Bupati Bima hendaknya meninjau kembali izin yang diberikan,” tandasnya <p>Dua pernyataan diatas merujuk pada penanganan untuk meninjau kembali ijin yang diberikan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara. Kedua pelantun yang melontrkan hal tersebut adalah orang-orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, kutipan langsung dari Ketua DPRD NTB pada paragraf 32 tersebut semakin mempertegas sikap pemerintah daerah dalam penanganan peristiwa ini.</p>		<p>ini, Bupati Bima hendaknya meninjau kembali izin yang diberikan” <i>Keywords</i> meninjau kembali dalam artikel di atas dilontarkan oleh dua pelantun yaitu Gubernur NTB serta Ketua DPRD NTB. Hal ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang harus dinilai kembali karena dirasa adanya ketidakberesan.</p> <p>Visual Image</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiga buah foto yang berisi korban. Dua foto berlatar pelabuhan, sedangkan satu foto berlatar rumah sakit.
--	--	--	--

<p>6. HL Sujirman Sebagai perwakilan rakyat di daerah NTB, Ketua DPRD NTB HL Surjiman adalah sosok yang dianggap mewakili rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya.</p> <p>7. H Mawardi Hamri H. Mawardi Hamri sebagai Direktur RSUP NTB. Pusat pelayanan publik daerah NTB sebagai sumber terkait jumlah dan kondisi korban paska peristiwa pembubaran</p>			
<p style="text-align: center;">Frame Seleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembubaran aksi massa di Pelabuhan Sape berakhir ricuh hingga timbul korban. 2. Tidak terdapat kata sepakat dalam proses negosiasi antara pihak aparat keamanan dengan massa yang melakukan aksi. 3. Perlunya ditinjau kembali tentang pemberian ijin tambang sebagai penyebab utama pemblokiran pelabuhan yang juga sebagai tuntutan utama massa. 		<p style="text-align: center;">Frame Saliansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wacana yang ditonjolkan dalam frame saliansi adalah mengenai peristiwa pembubaran paksa yang berakhir dengan timbulnya korban. Dari Struktur sintaksis dan struktur retorik didapatkan bahwa Lombok Post memfokuskan penulisan pada rangkaian peristiwa yang terjadi. 	
<p style="text-align: center;">Media Frame</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lombok Post cenderung membingkai peristiwa yang terjadi adalah akibat dari tindakan anarkis warga yang merugikan dan membuat suasana tidak kondusif. 			

Coding sheet Tema 3

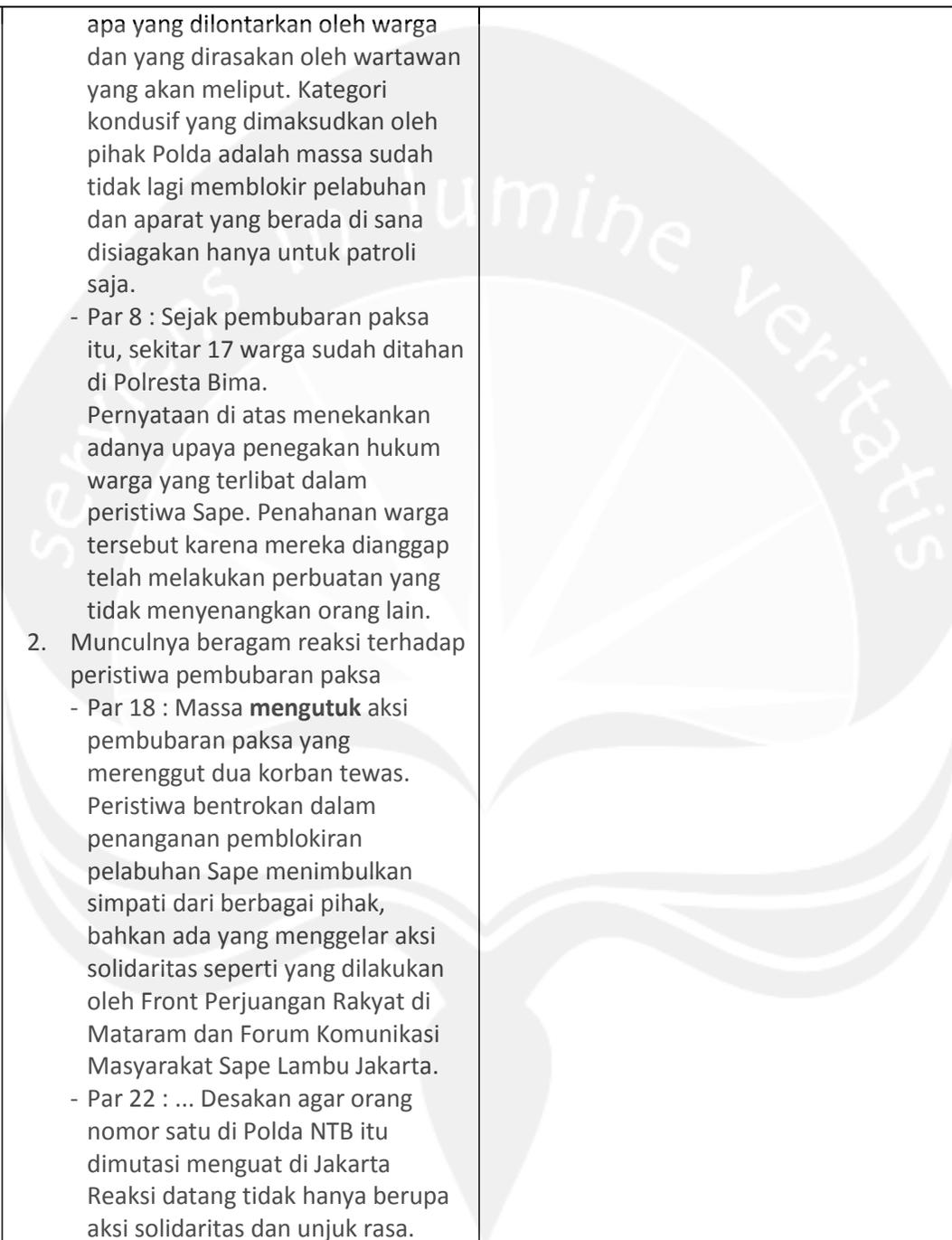
Judul Berita : Jalan Diblokir, Lambu Mencekam

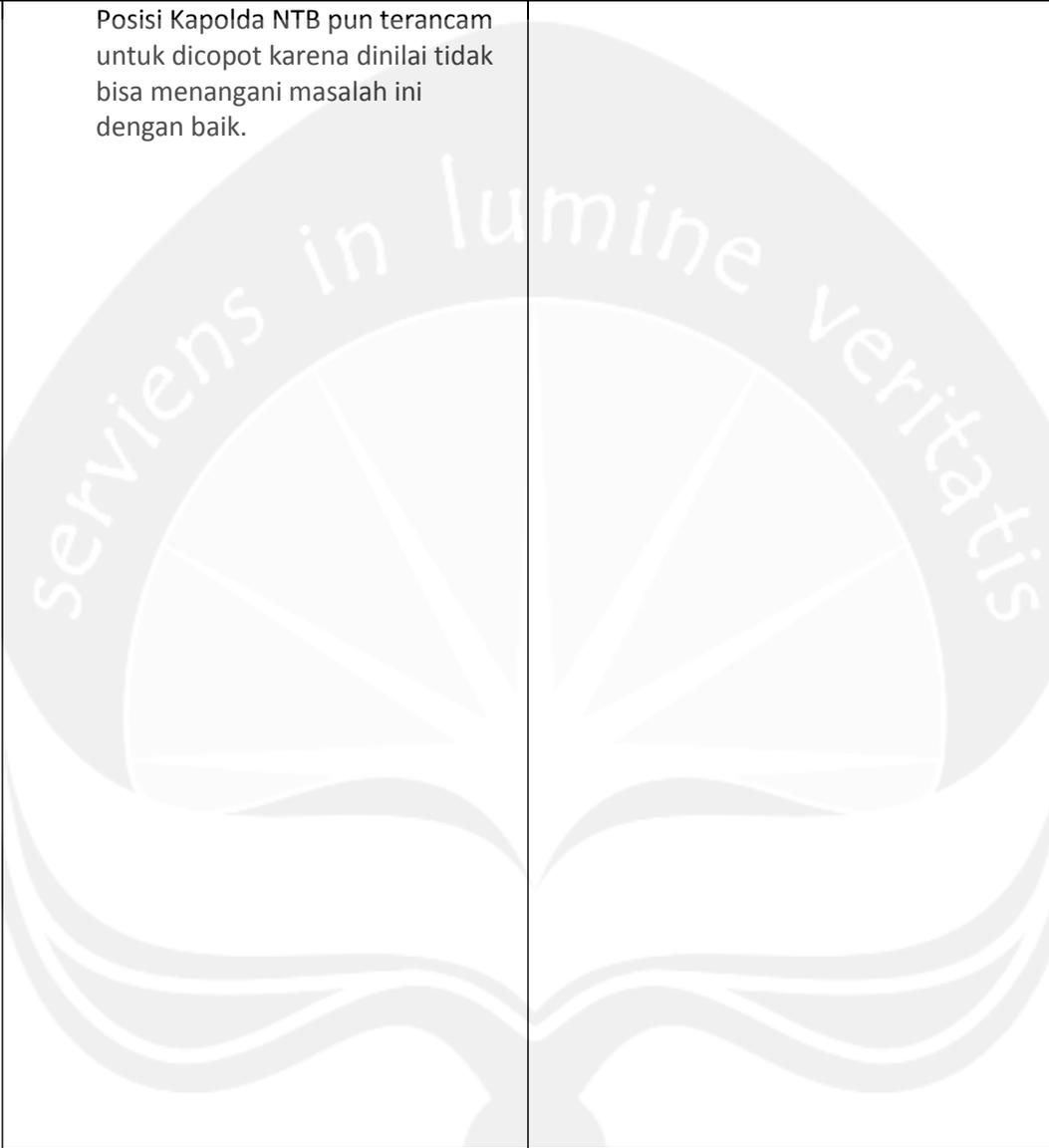
Tanggal terbit : 27 Desember 2011

Rubrik : *Headline* (hal 1)

Penulis : Indra Gunawan dan tim JPNN

Struktur Skriptual	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>Objek wacana Kondisi di Pelabuhan Sape sehari paska bentrok antaran aparat keamanan dengan massa FRAT</p> <p>Pelibat wacana / subjek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Massa FRAT Masyarakat yang menolak kehadiran tambang di wilayah Kecamatan Lambu. Massa FRAT memblokir Pelabuhan yang berakibat akses NTB-NTT terputus. Selain itu, Massa FRAT juga menolak untuk membuka blokir pelabuhan jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Karena sudah satu minggu menduduki pelabuhan, dan tidak ditemukan kata sepakat dalam negosiasi, akhirnya aparat keamanan membubarkan secara paksa aksi mereka. Karena sudah merugikan banyak pihak dan juga mengganggu ketertiban umum. 2. Kepolisian Daerah NTB Sebagai penegak hukum di tingkat daerah, penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah NTB menjadi sorotan yang utama. 3. Kapolda NTB Sebagai orang yang memegang 	<p>Jenis wacana Wacana yang muncul dalam artikel ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Pelabuhan Sape paska pembubaran paksa Wacana ini dapat terlihat dalam : <ul style="list-style-type: none"> - Judul : Jalan Diblokir, Lambu Mencekam - Lead : Ini kondisi terakhir pascainsiden bentrok massa dengan aparat di Pelabuhan Sape, Bima, Sabtu lalu. Suasana di Kecamatan Lambu masih mencekam. - Par 5 : “...Tidak satupun orang bisa lewat dengan leluasa, kecuali orang yang mereka kenal.” - Par 6 : ... Sejumlah wartawan yang coba masuk ke Desa Rato kemarin siang dicegat sejumlah warga yang telah siap dengan senjata tajam. Pernyataan di atas menggambarkan kondisi bahwa keadaan di sekitar Pelabuhan Sape masih belum pulih. Bahkan wartawan pun telah merasakan sendiri kondisi tersebut. - Par 7 : ... Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein mengatakan kondisi terkini di Lambu sudah kondusif. Pernyataan ini berbeda dengan 	<p>Placement dalam struktur pemberitaan Kondisi di Pelabuhan Sape sehari paska bentrok antaran aparat keamanan dengan massa FRAT mendominasi artikel ini. Terlihat dari judul “Jalan Diblokir, Lambu Mencekam”. Pada bagian awal artikel, lebih banyak berisi tentang kondisi sosial dan keamanan di wilayah sekitar Pelabuhan Sape. Kondisi tersebut dituliskan mulai dari <i>lead</i> hingga paragraf 16. Di tengah artikel disisipkan tentang wacana mutasi Kapolda NTB. Wacana tersebut tersebar mulai dari paragraf 22 hingga paragraf 29. Setelahnya, wacana kembali pada kondisi paska bentrokan. Namun, wacana pada bagian ini di dominasi oleh kerugian serta akibat yang dirasakan oleh warga setempat akibat bentrokan tersebut.</p>	<p>Methapors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Judul : Jalan Diblokir, Lambu Mencekam - Lead : ... Suasana di Kecamatan Lambu asal massa aksi masuk mencekam - Par 5 : ... saat ini suasana di Lambu mencekam. Kata mencekam berulang kali digunakan dalam penulisan Lombok Post terkait dengan peristiwa bentrokan di Sape. Penggunaan kata mencekam menekankan bahwa Sape dalam keadaan yang tidak kondusif serta berada di bawah tekanan. Penggunaan yang berulang-ulang membuat gambaran suasana yang tidak kondusif tersebut semakin melekat dalam pikiran pembaca. - Par 16 : ... untuk mengusut insiden berdarah tersebut. Kata insiden berdarah menekankan bahwa kejadian tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Dengan menggunakan kata insiden menekankan bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang tidak diperkirakan. - Par 18 : Massa mengutuk aksi pembubaran paksa.

<p>kendali atas keputusan dalam penanganan terkait peristiwa Sape, setiap keputusan Kapolda NTB memiliki resiko. Keputusan untuk membubarkan secara paksa massa yang berada di pelabuhan Sape hingga mengakibatkan korban jiwa memunculkan banyak reaksi dari masyarakat.</p> <p>4. Massa Pendukung warga Sape menolak Tambang (Front Perjuangan Rakyat dan Forum Komunikasi Masyarakat Sape Lambu Jakarta) Banyak reaksi dari masyarakat yang timbul setelah peristiwa Sape terjadi. Beberapa di antaranya dari Front Perjuangan Rakyat yang melakukan aksinya di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Forum Komunikasi Masyarakat Sape Lambu Jakarta yang menggelar aksinya di Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap warga Lambu dan Sape.</p> <p>Pelantun wacana / narasumber</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H Junaidin Sebagai salah seorang tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Lambu. Sebagai seorang tokoh masyarakat, H Junaidi dianggap mengerti dan memahami karakteristik dan juga kondisi sosial masyarakat setempat. 2. Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein Pihak kepolisian daerah NTB lebih 	<p>apa yang dilontarkan oleh warga dan yang dirasakan oleh wartawan yang akan meliput. Kategori kondusif yang dimaksudkan oleh pihak Polda adalah massa sudah tidak lagi memblokir pelabuhan dan aparat yang berada di sana disiagakan hanya untuk patroli saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 8 : Sejak pembubaran paksa itu, sekitar 17 warga sudah ditahan di Polresta Bima. Pernyataan di atas menekankan adanya upaya penegakan hukum warga yang terlibat dalam peristiwa Sape. Penahanan warga tersebut karena mereka dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. <p>2. Munculnya beragam reaksi terhadap peristiwa pembubaran paksa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 18 : Massa mengutuk aksi pembubaran paksa yang merenggut dua korban tewas. Peristiwa bentrokan dalam penanganan pemblokiran pelabuhan Sape menimbulkan simpati dari berbagai pihak, bahkan ada yang menggelar aksi solidaritas seperti yang dilakukan oleh Front Perjuangan Rakyat di Mataram dan Forum Komunikasi Masyarakat Sape Lambu Jakarta. - Par 22 : ... Desakan agar orang nomor satu di Polda NTB itu dimutasi menguat di Jakarta Reaksi datang tidak hanya berupa aksi solidaritas dan unjuk rasa. 		<p>Mengutuk selalu berkonotasi negatif dalam penggunaannya. Mengutuk bisa diartikan mengharapkan terjadi hal yang buruk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 19 : ... “Peristiwa penembakan telah menciderai hati nurani rakyat.” Hati nurani adalah perasaan dan juga keadaan yang terkait dengan kondisi psikologi bukan ragawi. Menciderai hati nurani dapat dimaknai sebagai tindakan yang memberikan perasaan tidak nyaman dan juga menimbulkan emosi. - Par 20 : ... lebih memilih tindakan represif hingga terjadi tragedi berdarah. Kata tragedi memberi kesan buruk dalam penggunaannya, apalagi ketika dipasangkan dengan kata berdarah hingga menimbulkan kesan bahwa kondisi di Sape dalam keadaan yang sangat parah. <p>Catchphrase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par 8 : ... “Para tersangka tersebut telah mengajak ndan memprovokasi serta melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain.” Bagian yang dicetak tebal bisa memiliki banyak makna. Pada artikel ini perbuatan yang dimaksud adalah pemblokiran pelabuhan yang berakibat pada terputusnya jalur NTB-NTT yang
---	---	--	---

<p>banyak diwakilkan oleh Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein dalam memberikan tanggapan terkait peristiwa yang terjadi. Kepentingan pernyataan dari pihak kepolisian daerah NTB adalah mengenai kondisi dan situasi yang terjadi. Sebagai orang yang ditunjuk sebagai perwakilan Kepolisian NTB dalam memberikan informasi, segala keterangan yang diberikan oleh AKBP Sukarman Husein merepresentasikan pihak Polda NTB.</p> <p>3. Tanjung Korlap Front Perjuangan Rakyat yang menggelar aksi unjuk rasa di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk solidaritas terhadap peristiwa yang terjadi di Sape, Bima</p> <p>4. Ferdian / korlap Forum Korlap Komunikasi Masyarakat Lambu Sape Jakarta yang melakukan aksi solidaritas di wilayah Jakarta</p> <p>5. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution Sebagai pihak yang mewakili Polri dalam memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi di Sape.</p>	<p>Posisi Kapolda NTB pun terancam untuk dicopot karena dinilai tidak bisa menangani masalah ini dengan baik.</p>		<p>menyebabkan banyak pihak merasa dirugikan.</p> <p>Visual Image</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan satu buah foto yang menggambarkan sebuah jalan yang ditutup dengan menggunakan batang kayu yang besar. Suasana di sekitarnya tampak sepi.
<p style="text-align: center;">Frame Seleksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Pelabuhan Sape paska bentrok antara massa FRAT dengan aparat keamanan belum sepenuhnya pulih. Masyarakat masih tidak membiarkan orang asing keluar masuk wilayah mereka secara leluasa. 2. Peristiwa tersebut menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Tidak hanya di wilayah NTB namun dari luar NTB seperti dari Jakarta. 	<p style="text-align: center;">Frame Saliansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wacana yang ditonjolkan dalam frame saliansi artikel ini adalah mengenai kondisi di pelabuhan Sape paska bentrok antara aparat keamanan dengan massa FRAT yang memblokir pelabuhan. Dalam tulisannya ini, Lombok Post lebih banyak menulis tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. 		

Media Frame

1. Lombok Post cenderung membingkai peristiwa bentrokan tersebut berakibat buruk dan membuat kondisi tidak kondusif.



Coding sheet Tema 4

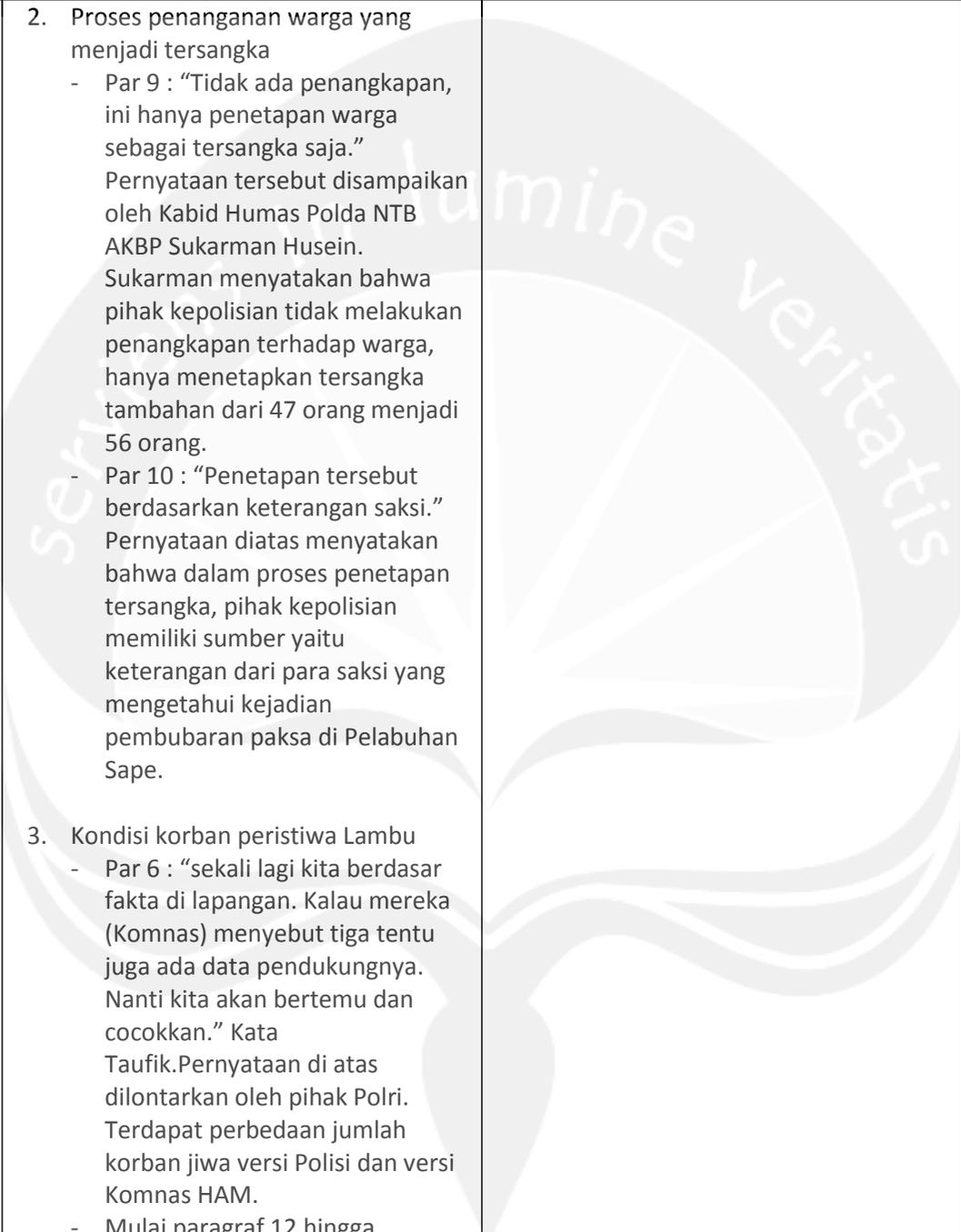
Judul Berita : Lima Polisi Disidang

Tanggal terbit : 5 Januari 2012

Rubrik : *Headline* (hal 1)

Penulis : Indra Gunawan dan tim JPNN

Struktur Skriptual	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>Objek wacana Proses penyelesaian kasus bentrok Sape.</p> <p>Pelibat wacana / subjek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lima anggota polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial Briptu F, Briptu S, Briptu A, Briptu MS, Bribda Fz Proses peradilan lima anggota polisi tersebut mendapat porsi yang cukup banyak di awal artikel ini. Kelima polisi tersebut dianggap telah melanggar prosedur tetap keamanan dan dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terhadap massa yang melakukan aksi di Sape. 2. Warga yang menjadi tersangka Terdapat 47 orang warga yang dinyatakan sebagai tersangka dalam peristiwa Sape. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan warga yang melakukan tindakan pidana saat pembubaran massa. 3. Warga yang menjadi korban Dalam artikel ini, tulisan terkait dengan korban peristiwa Sape memang tidak terlalu banyak dibahas. Namun, tulisan tentang korban diberi sub judul tersendiri. 	<p>Jenis wacana Wacana yang muncul dalam artikel ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penanganan lima anggota polisi yang menjadi tersangka Wacana ini dapat dicermati dalam : <ul style="list-style-type: none"> - Judul : Lima Polisi Disidang - Lead : ... rencananya lima polisi akan menjalani sidang kode etik. - Par 2 : “Itu nanti terbuka, jadi silakan teman-teman ikut mengawasi.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol HM Taufik. Dapat diartikan bahwa proses penyelesaian peristiwa ini terbuka terhadap publik, sehingga publik bisa mengetahui keputusan dan jalannya proses penyelesaian. - Par 3 : ...”Bukan mengakui atau tidak, tetapi ada mekanisme tentang investigasi secara internal dan tidak menutup terhadap temuan eksternal.” Pernyataan di atas memberi gambaran bahwa pihak kepolisian memiliki aturan tersendiri dalam mengusut anggota mereka yang menjadi tersangka dalam peristiwa Sape. 	<p>Placement dalam struktur pemberitaan Artikel ini secara keseluruhan terbagi menjadi tiga bagian besar. Pertama, bagian awal artikel lebih banyak bicara tentang proses penyelesaian terhadap aparat yang dianggap melanggar prosedur tetap keamanan. Mulai dari judul hingga paragraf ketiga. Bagian kedua tentang kondisi korban, dimana masih ada kesimpangsiuran jumlah korban yang tewas versi polisi dengan versi Komnas HAM. Kondisi korban juga diletakkan pada sub judul artikel ini yang bicara tentang kondisi korban luka-luka. Bagian ketiga adalah tentang proses penanganan tersangka yang berasal dari warga. Pihak polisi menekankan bahwa tidak ada penangkapan warga, hanya penetapan tersangka sehingga membuat jumlah tersangka bertambah dari 47 menjadi 56 orang.</p>	<p>Methapors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lead : Proses penyelesaian kasus kerusuhan Sape, Bima memasuki babak baru. Babak baru dalam artikel ini dapat dimaknai sebagai proses lanjutan dari proses-proses yang sebelumnya telah dilakukan pihak kepolisian untuk menangani kasus peristiwa pembubaran paksa di Pelabuhan Sape, Bima. - Par 2 : ... Taufik enggan berpolemik. Pernyataan di atas dilontarkan agar masyarakat tidak memiliki persepsi masing-masing tentang penanganan kasus Pelabuhan Sape ini. Masyarakat bisa mengikuti proses penanganan kasus karena pihak kepolisian akan terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. <p>Visual Image</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artikel ini memakai dua buah foto yang berisi gambar korban terbaring di RSUP NTB.

<p>Korban luka masih dirujuk ke RSUP NTB untuk penanganan medis selanjutnya.</p> <p>Pelantun wacana / narasumber</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol HM Taufik Sebagai perwalikan Polri dalam menyampaikan pernyataan terkait dengan penyelesaian peristiwa Sape, Bima. Brigjem Pol HM Taufik dalam artikel ini lebih banyak berbicara tentang proses penyelesaian terkait anggota polisi yang menjadi tersangka. 2. Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein Kepentingan pernyataan dari pihak kepolisian daerah NTB adalah mengenai kondisi dan situasi yang terjadi. Sebagai orang yang ditunjuk sebagai perwakilan Kepolisian NTB dalam memberikan informasi, segala keterangan yang diberikan oleh AKBP Sukarman Husein merepresentasikan pihak Polda NTB. 3. Ismail Korban dalam peristiwa Sape ini memberikan keterangan terkait kondisi terakhirnya. Korban mengaku luka di bagian lengan, paha, dan juga dada. Korban ditembak dari jarak dekat yaitu sekitar tiga meter. 4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian RSUP NTB HL 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Proses penanganan warga yang menjadi tersangka <ul style="list-style-type: none"> - Par 9 : “Tidak ada penangkapan, ini hanya penetapan warga sebagai tersangka saja.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein. Sukarman menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap warga, hanya menetapkan tersangka tambahan dari 47 orang menjadi 56 orang. - Par 10 : “Penetapan tersebut berdasarkan keterangan saksi.” Pernyataan diatas menyatakan bahwa dalam proses penetapan tersangka, pihak kepolisian memiliki sumber yaitu keterangan dari para saksi yang mengetahui kejadian pembubaran paksa di Pelabuhan Sape. 3. Kondisi korban peristiwa Lambu <ul style="list-style-type: none"> - Par 6 : “sekali lagi kita berdasar fakta di lapangan. Kalau mereka (Komnas) menyebut tiga tentu juga ada data pendukungnya. Nanti kita akan bertemu dan cocokkan.” Kata Taufik.Pernyataan di atas dilontarkan oleh pihak Polri. Terdapat perbedaan jumlah korban jiwa versi Polisi dan versi Komnas HAM. - Mulai paragraf 12 hingga 		
--	---	--	--

<p>Hamzi Fikri Perwakilan dari pihak rumah sakit yang menangani korban. HL Hamzi Fikri memberi keterangan terkait dengan hasil diagnosa korban.</p>	<p>paragraf 15, wartawan memberi subjudul baru yaitu “Dua Korban Bentrok Kritis”</p>		
<p style="text-align: center;">Frame Seleksi</p> <p>1. Proses penyelesaian peristiwa Pelabuhan Sape dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sudah ada penetapan tersangka dari pihak aparat kepolisian dan juga warga yang melakukan tindak pidana. Namun keterangan yang didapat cenderung berasal dari pihak kepolisian.</p>	<p style="text-align: center;">Frame Saliansi</p> <p>1. Wacana yang ditonjolkan dalam frame saliansi pada artikel ini adalah mengenai proses penanganan peristiwa Sape</p>		
<p style="text-align: center;">Media Frame</p> <p>1. Lombok Post menyajikan proses penyelesaian peristiwa Sape, dan cenderung memberi tendensi kepada pihak aparat keamanan.</p>			

Hasil Wawancara

Dominikus Umbu Pati selaku Redaktur Lombok Post

Lokasi : Graha Pena Lombok Post

Tanggal : 21 Juni 2012

Apakah kebijakan redaksi Lombok Post dipengaruhi Jawa Pos ?

Kita *independent mbak*. Tidak ada urusan redaksi yang tergantung dari sana. Berita A kita mau jadikan *headline asal* itu sesuai dengan kriteria ya kita masukkan. Benar-benar mandiri Lombok Post ini. Tapi, hubungan dengan sana tetap kita jaga, dalam arti ketika sana butuh informasi atau berita daerah dan sekiranya kita punya beritanya, ya kita kasih. Tapi untuk keputusan redaksional kita mandiri. Tapi ada satu wartawan kita yang memang di tempatkan di pusat, di JPNN ya namanya, Jawa Pos News Network itu untuk mencari informasi kalau-kalau butuh sumber yang dari pusat.

Latar belakang wartawan

Wartawan kita itu *multidisipliner mbak*, *jadi* dari macam-macam latar pendidikan. Kalau yang bukan berasal dari bidang jurnalistik kita memang tidak ada pelatihan khusus. Kalau masuk, *ya* kita coba dengan berikan liputan ringan dulu. Kurang lebih selama tiga bulan. Kita lihat kemampuannya. Jadi, tidak hanya kemampuan menulis, tapi kemampuan untuk menggali informasi berita juga kita perhitungkan. Biasanya, liputan awal itu tentang berita kriminal *ya*. Dari sisi informasinya itu lebih mudah didapatkan. 5W + 1H nya sudah jelas kalau seperti itu.

Prosedur produksi berita di Lombok Post

Ya, kalau soal prosedur di sini sih sama ya kayak yang lain. Semua pasti dimulai dari yang namanya rapat redaksi dulu. Rapatnya tiap hari jam delapan malam. Semua yang punya kepentingan mulai dari redaktur sampai wartawan ikut. Tapi kalau semisal berhalangan, update info tetap kita lakukan, bisa lewat sms atau email. Kalau sekiranya urgent ya kita by phone. Itu sih biasanya untuk penugasan liputan-liputan khusus ya, ya kayak investigasi atau liputan feature yang agak berat lah.

Peran redaktur dalam penulisan sebuah berita

Saya bisa memastikan kalau tidak ada perubahan dari konten yang dilakukan oleh redaktur. *Ya*, kalau saya ibaratkan masak, masakannya sudah dibuat dan dibumbui *sama* wartawan.

Tapi, *pas* dicicip di lidah redaktur *kok* rasanya kurang asin, jadi ditambah garam *dikit*. Tapi secara umum *kan* masakannya sama.

Standar kelayakan berita

Tapi gambaran umumnya seperti ini, jadi di dalam berita tu, misalnya kita ambil sape ya, ada dramatiknya. Kemudian mengandung unsur-unsur berita tadi itu ya. Kemudian ada unsur baru, lalu ada human interestnya, kemudian ada unsur kedekatan. Jadi pembaca Lombok Post kan kebanyakan berada di Nusa Tenggara Barat dan peristiwa ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, peristiwa itu harus punya daya tarik. Artinya setiap orang berkeinginan mengetahui lebih lanjut. Dan ada lagi beberapa kriteria yang lain. Nanti mungkin bisa saya liatkan di catatan saya. Masing-masing unsur tadi memiliki skor tersendiri. Nantinya skor tersebut berpengaruh terhadap kelayakan berita tersebut untuk ditampilkan.

Pendapat tentang Konflik di Sape

Itu terjadi sudah lama sekali. Sudah dari 2008. Tidak hanya ini saja mereka melakukan aksi, tahun berapa ya itu 2011 kalau *gak* salah, mereka juga pernah buat *kayak* gini. *Cuman gak sampe* blokir pelabuhan. Nah, Kita di media massa itu merekam peristiwa. Kemudian dengan segala kebijaksanaan di redaksi berupaya untuk membuat berita yang berimbang. Nah, jadi posisi Lombok Post dalam hal ini redaksi adalah merekam peristiwa yang terjadi saja. Jadi tidak akan memihak. Misalnya ada dua orang yang bertikai atau dua kelompok lalu terjadi pemihakan di salah satu, tidak. Jadi apa yang terjadi itu yang direkam. Nah, ini mengenai peristiwa sape ini, kami tidak melibatkan diri di dalamnya. Jadi semata-mata melihat peristiwa ini ya karena itu terjadi dan informasinya dibutuhkan publik maka kita sampaikanlah. Dan kita berkewajiban untuk menginformasikan. Karena kita berkewajiban memenuhi kebutuhan publik dan keingin tahaan masyarakat. Ada kan ya masyarakat dari sisi lain yang terkena imbasnya. Lalu kami mencoba menghimpun data-data dari orang-orang ini. Artinya karena peristiwa ini terjadi, banyak korban tanda petik yang dirugikan. Misalnya tidak bisa bekerja dan mencari makan. Dengan harapan pihak yang bertikai tadi ini tersentuh dan bisa mengakhiri konfliknya. Kami pendekatannya melihat, *oh* ternyata ada korban lain diluar pihak yang bertikai tersebut

Konflik dan profit Lombok Post

Berita tentang konflik itu sudah sering ya. Ya karena sudah sering itu tadi makanya masyarakatnya jadi *kebal*. Dianggap hal yang biasa *aja gitu*. Penulisan berita konflik ini juga sebenarnya berdampak pada profit ya. Kalau kami menyajikan berita yang disukai *sama* masyarakat, ya masyarakat *kan* pasti akan beli korannya untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang berita tersebut.

Special request ke wartawan

Kita membebaskan wartawan. Terserah mereka mau cari informasi di mana dan tentang apa saja, asal relevan. Sudut pandang berita yang ditulis pun itu terserah wartawan. *Kan* mereka yang di lapangan, yang *tau* situasi kondisinya langsung. Tapi ada memang kasus-kasus tertentu yang memang kami pesankan ke wartawan. *Ya*, jangan sampai mereka sudah *capek-capek* nulis berita, tapi *gak* dinaikin sama redaksi gara-gara ada yang *nyantol*.

Tentang *frame* konflik

Tidak ada yang dlebihkan atau dikurangi. Itu semua apa adanya dari lapangan. Dari apa yang wartawan saksikan di lokasi. Memang agak susah ya untuk berita konflik dan perang memang. Ketika sebagai jurnalis atau ya wartawan menulis tentang hal tersebut, terkadang dirasa tidak sensitif. Padahal ya kami sudah berusaha untuk bisa menulis dengan seimbang. Kalau memang keadaannya tidak kondusif masak iya sih kita mau bilang baik-baik saja. *Kan* ya tidak logis juga tho.



Hasil Wawancara

Indra Gunawan selaku Wartawan Lombok Post

Lokasi : Graha Pena Lombok Post

Tanggal : 22 Juni 2012

Bagaimana latar belakang peristiwa konflik Sape

Hasil penelusuran saya di lapangan, reaksi penolakan warga Lambu hingga melakukan tindakan anarkis berupa pembakaran Kantor Camat Lambu, pemblokiran Pelabuhan itu karena ada upaya penggalangan dukungan dari elemen mahasiswa setempat. Pada awalnya aksi dilakukan mahasiswa, tidak ada satupun warga yang ikut. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, kalangan mahasiswa kemudian memprovokasi warga dengan memutar video tentang kerusakan lingkungan akibat pertambangan di daerah lain. Melihat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan dari video tersebut, warga mulai terprovokasi. Jika PT Sumber Mineral Nusantara melakukan eksploitasi, mereka khawatir tidak lagi bisa bercocok tanam seperti biasa.

Pendapat tentang Konflik Sape

Pembubaran paksa dilakukan aparat kepolisian terhadap massa yang telah memblokir Pelabuhan Sape, memang harus dilakukan. Pertimbangannya, sekian hari penyeberangan dari pelabuhan Sape ke Labuan Bajo, Flores maupun ke Sumba tidak jalan. Sementara antrian kendaraan yang mengangkut kebutuhan warga di wilayah NTT yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru makin banyak. Begitu juga dengan warga Labuan Bajo maupun Sumba yang akan merayakan Natal bersama keluarganya, tertahan di pelabuhan Sape. Jika Polisi tidak membubarkan massa FRAT yang menduduki Pelabuhan Sape, dikhawatirkan akan muncul persoalan yang lebih besar yakni isu Sara. Karena bisa saja informasi yang berkembang di wilayah NTT, warga Bima sengaja menghalangi warga NTT pulang merayakan Natal dan Tahun baru bersama keluarga mereka. Sekaligus menghambat droping barang kebutuhan Natal dan Tahun Baru warga di wilayah Timur. Konflik ini merupakan suatu fenomena sosial yang dapat berkembang menjadi konflik politik, ekonomi hingga hukum. Solusi untuk menghadapi masalah ini adalah peran pemerintah daerah harus dioptimalkan karena mereka bertanggung jawab terhadap hal ini.

Kondisi di Sape ketika bentrokan terjadi

Harus diakui, pemberitaan kita pada awalnya lebih banyak menyajikan fakta tentang kejadian di lapangan. Kendala dihadapi wartawan saat itu, paska pembubaran paksa massa di Pelabuhan Sape, jalur ke wilayah Kecamatan Lambu di blokir warga. Wartawan sendiri tidak leluasa bisa memasuki wilayah Lambu saat itu akibat pemblokiran itu. Kalaupun wartawan bisa melewati blockade warga, tidak diperkenankan mewawancara warga, kecuali orang tertentu yang ditunjuk oleh FRAT. Saya sendiri baru bisa masuk ke wilayah Lambu, bersamaan dengan Tim Komnas HAM yang melakukan investigasi penembakan dua orang warga yang meninggal dunia saat pembubaran paksa. Itupun saat itu, saya bersama sejumlah wartawan lain yang ikut Komnas HAM hanya diperkenankan mewawancara

warga yang kena peluru karet. Selebihnya tidak dipebolehkan, karena kondisi warga saat ini sensitif. Malah ada kejadian saat itu, Gambar yang diambil salah seorang teman wartawan, sempat diperiksa oleh warga. Mereka tidak ingin mengambil gambar lain, kecuali foto korban yang luka tembak. Peralnya, paska warga dibubarkan paksa dari Pelabuhan Sape. Selain memblokade jalan, warga juga melampiasikan dengan merusak Kantor instansi pemerintah yang ada di Kecamatan lambu, termasuk rumah PNS atau warga yang dianggap pro pemerintah.

Adakah bagian yang dikurangi atau dilebihkan + jurnalisme damai

Selama ini menekuni profesi ini, saya mencoba jujur pada diri sendiri. Karena seorang wartawan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap sebuah pemberitaan. Kalaupun ada yang dikurangi dari statemen sumber, itupun tidak mengurangi substansinya. Untuk fakta di lapangan, saya mencoba menulis apa adanya, kecuali untuk beberapa bagian yang menurut saya, jika dimunculkan dikhawatirkan akan memicu persoalan baru, atau makin memperkeruh keadaan. Dan harus diakui pemberitaan yang banyak diminati pembaca, tentu saja berita tentang konflik. Penerapan jurnalisme damai sudah dilakukan Lombok Post. Meski dalam penilaian orang, mungkin belum makasimal.

Special request dari media

Tidak ada pembatasan dari media tempat saya bekerja. Media menyerahkan sepenuhnya pada wartawan. Kecuali ada beberapa petunjuk yang diberikan. Sehingga pemberitaan yang ditulis, lebih komprehensif pada semua aspek. Baik tentang peristiwa atau konflik yang terjadi, maupun dampak yang ditimbulkan

Pengalaman menulis tentang konflik

Saya sudah cukup sering ya menulis berita konflik, utamanya berita tentang konflik horizontal, baik antar kelompok warga maupun perang antar kampung. Khusus untuk berita konflik, selain memang menyajikan data dan fakta yang ada di lapangan. Kita biasanya menelusuri apa akar masalah sehingga muncul konflik antar warga maupun antar kelompok. Dengan terungkapnya akar permasalahannya, saya mencoba mencari sumber lain berkompeten dengan persoalan itu, bagaimana mencari jalan keluar agar kedua kelompok yang bertikai mengakhiri konflik. Ya memang agak sedikit sulit ya, karena kita harus cermat betul dalam menyampaikan dan mengolah informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita justru dianggap memperkeruh suasana yang sudah panas.